

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN  
DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun, perlu memenuhi sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan dasar melalui penambahan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik

- Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 101) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20 September 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681112 199102 1 002

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 35

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
MALANG NOMOR 101 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

SATUAN PENDIDIKAN DASAR PEMERINTAH KOTA MALANG

I. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

A. Wilayah Kecamatan Klojen sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Klojen;
2. Sekolah Dasar Negeri Kiduldalem 1;
3. Sekolah Dasar Negeri Kiduldalem 2;
4. Sekolah Dasar Negeri Kauman 1;
5. Sekolah Dasar Negeri Kauman 2;
6. Sekolah Dasar Negeri Kauman 3;
7. Sekolah Dasar Negeri Kasin;
8. Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo 1;
9. Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo 2;
10. Sekolah Dasar Negeri Bareng 1;
11. Sekolah Dasar Negeri Bareng 2;
12. Sekolah Dasar Negeri Bareng 3;
13. Sekolah Dasar Negeri Bareng 4;
14. Sekolah Dasar Negeri Bareng 5;
15. Sekolah Dasar Negeri Gadingkasri;
16. Sekolah Dasar Negeri Penanggungan;
17. Sekolah Dasar Negeri Oro-Oro Dowo;
18. Sekolah Dasar Negeri Rampalcelaket 1; dan
19. Sekolah Dasar Negeri Rampalcelaket 2.

B. Wilayah Kecamatan Lowokwaru sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 2;
3. Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 3;
4. Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 4;
5. Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 5;
6. Sekolah Dasar Negeri Tulusrejo 1;
7. Sekolah Dasar Negeri Tulusrejo 2;

8. Sekolah Dasar Negeri Tulusrejo 3;
9. Sekolah Dasar Negeri Tulusrejo 4;
10. Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 1;
11. Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 2;
12. Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 3;
13. Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 4;
14. Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 5;
15. Sekolah Dasar Negeri Tlogomas 1;
16. Sekolah Dasar Negeri Tlogomas 2;
17. Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 1;
18. Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 2;
19. Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 3;
20. Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 4;
21. Sekolah Dasar Negeri Ketawanggede;
22. Sekolah Dasar Negeri Sumpalsari 1;
23. Sekolah Dasar Negeri Sumpalsari 2;
24. Sekolah Dasar Negeri Sumpalsari 3;
25. Sekolah Dasar Negeri Merjosari 1;
26. Sekolah Dasar Negeri Merjosari 2;
27. Sekolah Dasar Negeri Merjosari 3;
28. Sekolah Dasar Negeri Merjosari 4;
29. Sekolah Dasar Negeri Merjosari 5;
30. Sekolah Dasar Negeri Tunggulwulung 1;
31. Sekolah Dasar Negeri Tunggulwulung 2;
32. Sekolah Dasar Negeri Tunggulwulung 3;
33. Sekolah Dasar Negeri Tasikmadu 1;
34. Sekolah Dasar Negeri Tasikmadu 2;
35. Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 1;
36. Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 2;
37. Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 3;
38. Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 4;
39. Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 5;
40. Sekolah Dasar Negeri Tunjungsekar 1;
41. Sekolah Dasar Negeri Tunjungsekar 2;
42. Sekolah Dasar Negeri Tunjungsekar 3;
43. Sekolah Dasar Negeri Tunjungsekar 4;
44. Sekolah Dasar Negeri Tunjungsekar 5; dan
45. Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1.

C. Wilayah Kecamatan Blimbing sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Balarjosari 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Balarjosari 2;
3. Sekolah Dasar Negeri Polowijen 1;
4. Sekolah Dasar Negeri Polowijen 2;
5. Sekolah Dasar Negeri Polowijen 3;
6. Sekolah Dasar Negeri Arjosari 1;
7. Sekolah Dasar Negeri Arjosari 2;
8. Sekolah Dasar Negeri Arjosari 3;
9. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 1;
10. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 2;
11. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 3;
12. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 4;
13. Sekolah Dasar Negeri Blimbing 1;
14. Sekolah Dasar Negeri Blimbing 2;
15. Sekolah Dasar Negeri Blimbing 3;
16. Sekolah Dasar Negeri Blimbing 4;
17. Sekolah Dasar Negeri Blimbing 5;
18. Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 1;
19. Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 2;
20. Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 3;
21. Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 4;
22. Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 5;
23. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 1;
24. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 2;
25. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 3;
26. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 4;
27. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 5;
28. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 6;
29. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 7;
30. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 8;
31. Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 1;
32. Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 2;
33. Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 3;
34. Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 4;
35. Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 5;

36. Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 6;
37. Sekolah Dasar Negeri Kesatriyan 1;
38. Sekolah Dasar Negeri Kesatriyan 2;
39. Sekolah Dasar Negeri Kesatriyan 3;
40. Sekolah Dasar Negeri Polehan 1;
41. Sekolah Dasar Negeri Polehan 2;
42. Sekolah Dasar Negeri Polehan 3;
43. Sekolah Dasar Negeri Polehan 4;
44. Sekolah Dasar Negeri Polehan 5; dan
45. Sekolah Dasar Negeri Jodipan.

D. Wilayah Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Kedungkandang 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Kedungkandang 2;
3. Sekolah Dasar Negeri Lesanpuro 1;
4. Sekolah Dasar Negeri Lesanpuro 2;
5. Sekolah Dasar Negeri Lesanpuro 3;
6. Sekolah Dasar Negeri Lesanpuro 4;
7. Sekolah Dasar Negeri Buring;
8. Sekolah Dasar Negeri Wonokoyo 1;
9. Sekolah Dasar Negeri Wonokoyo 2;
10. Sekolah Dasar Negeri Tlogowaru 1;
11. Sekolah Dasar Negeri Tlogowaru 2;
12. Sekolah Dasar Negeri Bumiayu 1;
13. Sekolah Dasar Negeri Bumiayu 2;
14. Sekolah Dasar Negeri Bumiayu 3;
15. Sekolah Dasar Negeri Bumiayu 4;
16. Sekolah Dasar Negeri Arjowinangun 1;
17. Sekolah Dasar Negeri Arjowinangun 2;
18. Sekolah Dasar Negeri Mergosono 1;
19. Sekolah Dasar Negeri Mergosono 2;
20. Sekolah Dasar Negeri Mergosono 3;
21. Sekolah Dasar Negeri Mergosono 4;
22. Sekolah Dasar Negeri Mergosono 5;
23. Sekolah Dasar Negeri Kotalama 1;
24. Sekolah Dasar Negeri Kotalama 2;
25. Sekolah Dasar Negeri Kotalama 3;
26. Sekolah Dasar Negeri Kotalama 4;
27. Sekolah Dasar Negeri Kotalama 5;



28. Sekolah Dasar Negeri Kotalama 6;
29. Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 1;
30. Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 2;
31. Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 3;
32. Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 4;
33. Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 5;
34. Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 6;
35. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 1;
36. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 2;
37. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 3;
38. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 4;
39. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 5;
40. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 6;
41. Sekolah Dasar Negeri Cemorokandang 1;
42. Sekolah Dasar Negeri Cemorokandang 2;
43. Sekolah Dasar Negeri Cemorokandang 3;
44. Sekolah Dasar Negeri Cemorokandang 4; dan
45. Sekolah Dasar Negeri Model.

E. Wilayah Kecamatan Sukun sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Sukun 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Sukun 2;
3. Sekolah Dasar Negeri Sukun 3;
4. Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 1;
5. Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 2;
6. Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 3;
7. Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 4;
8. Sekolah Dasar Negeri Bakalan Krajan 1;
9. Sekolah Dasar Negeri Bakalan Krajan 2;
10. Sekolah Dasar Negeri Gadang 1;
11. Sekolah Dasar Negeri Gadang 2;
12. Sekolah Dasar Negeri Gadang 3;
13. Sekolah Dasar Negeri Gadang 4;
14. Sekolah Dasar Negeri Kebonsari 1;
15. Sekolah Dasar Negeri Kebonsari 2;
16. Sekolah Dasar Negeri Kebonsari 3;
17. Sekolah Dasar Negeri Kebonsari 4;
18. Sekolah Dasar Negeri Bandulan 1;
19. Sekolah Dasar Negeri Bandulan 2;

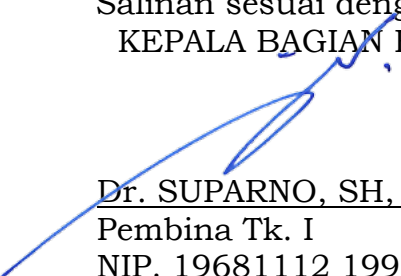
20. Sekolah Dasar Negeri Bandulan 3;
21. Sekolah Dasar Negeri Bandulan 4;
22. Sekolah Dasar Negeri Bandulan 5;
23. Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo 1;
24. Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo 2;
25. Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo 3;
26. Sekolah Dasar Negeri Percobaan 2;
27. Sekolah Dasar Negeri Pisangcandi 1;
28. Sekolah Dasar Negeri Pisangcandi 2;
29. Sekolah Dasar Negeri Pisangcandi 3;
30. Sekolah Dasar Negeri Pisangcandi 4;
31. Sekolah Dasar Negeri Karangbesuki 1;
32. Sekolah Dasar Negeri Karangbesuki 2;
33. Sekolah Dasar Negeri Karangbesuki 3;
34. Sekolah Dasar Negeri Karangbesuki 4;
35. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 1;
36. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 2;
37. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 3;
38. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 4;
39. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 5;
40. Sekolah Dasar Negeri Ciptomulyo 1;
41. Sekolah Dasar Negeri Ciptomulyo 2; dan
42. Sekolah Dasar Negeri Ciptomulyo 3.

## II. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

- A. Wilayah Kecamatan Klojen sebagai berikut:
  1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1;
  2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2;
  3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3;
  4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4;
  5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5;
  6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6;
  7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8;
  8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9; dan
  9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 19.
- B. Wilayah Kecamatan Lowokwaru sebagai berikut:
  1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 13;
  2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 18;

3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 25; dan
  4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 26
- C. Wilayah Kecamatan Blimbing sebagai berikut:
1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11;
  2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14;
  3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 16;
  4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 20;
  5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 24; dan
  6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 28.
- D. Wilayah Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:
1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7;
  2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10;
  3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 21;
  4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 22;
  5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 23; dan
  6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 27.
- E. Wilayah Kecamatan Sukun sebagai berikut:
1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12;
  2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 15;
  3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 17;
  4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 29; dan
  5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 30.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681112 199102 1 002

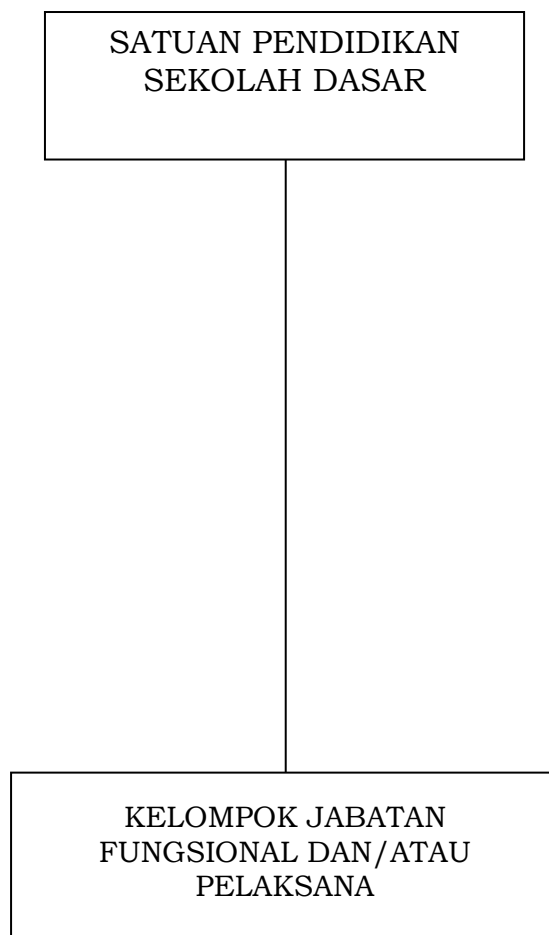
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA MALANG NOMOR 101 TAHUN  
2019 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681112 199102 1 002

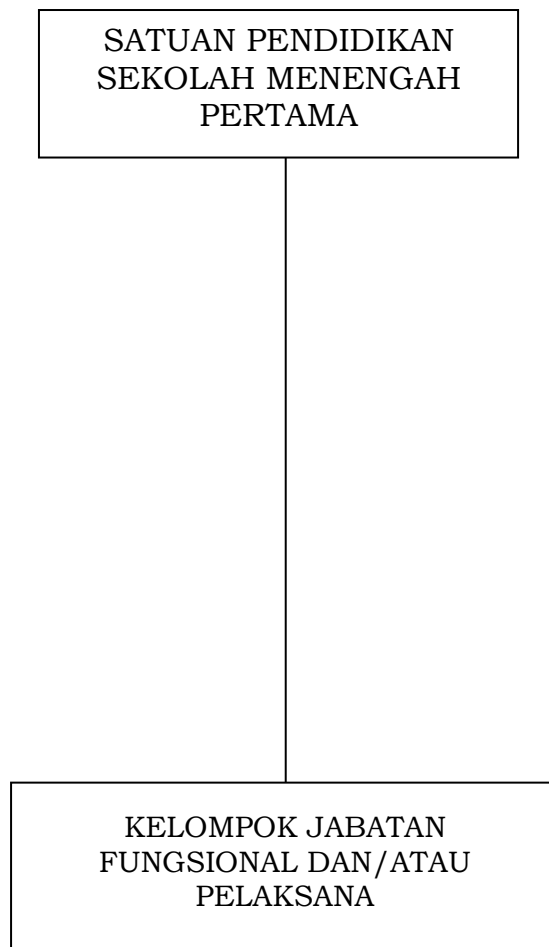
WALIKOTA MALANG,

ttd.

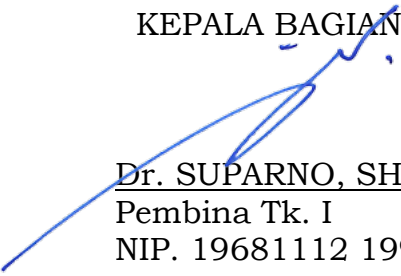
SUTIAJI

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA MALANG NOMOR 101 TAHUN  
2019 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI